ANALISIS AKUNTANBILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA

SKRIPSI

Nama : Era Sumantri
NIM : 22 2015089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

ANALISIS AKUNTANBILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Nama : Era Sumantri
NIM : 22 2015089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

Falkultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara
Nama	: Era Sumantri
NIM	: 222015089
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,

Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM :0212128102/1085022

Pembimbing II,

Darma Yanti, S.E.,Ak., M.M.,CA
NIDN/NBM :0219057901/1187172

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sofyuddin, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Era Sumantri
NIM	: 222015089
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul	: Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat ang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Februari 2020

METERAI TEMPEL
4ABF0AHF277327498
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Era Sumantri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Hidup ini adalah kesempatan untuk selalu belajar,belajar untuk jadi lebih baik lewat segala Hal yang terjadi dalam hidup

Siapa yang meili bersyukur dan belajar dari kegagalan ,maka dunia nya akan penuh sinar mentari ,harapan dan cinta

Dengan ketulusan dan do'a saya
Persembahkan skripsi ini khusus
Kepada:
Ayahanda dan Ibunda
Keluarga Besarku
Pembimbing Skripsi
Sahabat-Sahabat ku
Alamamater

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT berkat ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akuntanbilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa Di Kecamatan Penukal Utara "Telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini membahahas tentang bahwa Akuntanbilitas telah melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelo,menyajikan melaporakan serta menyapikan segala aktivitas yang di laksankan kepada masyrakat .Indikator akuntanbilitas kejujurran dan hukum,akuntanbilitas proses,akuntanbilitas program serta akuntanbilitas kebijakan telah di terapkan secara baik dalam pengelolaan dana desa sehingga pemerintahan desa tersebut sudah akuntanbel,Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) keuangan tahunan desa yang di tetapkan berdasarkan peraturan desa bail pendapatan desa,belanja desa maupun pembiyaan desa telah di gunakan untul mendukung kebutuhaan program pembagunan di Desa Tanjung Baru,Desa Sukarami,Desa Kota Baru di Kecamatan Penukal Utara .

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, Ayahanda tercinta (Sumadi) dan ibunda tersayang (Tri Utami) yang tak henti-hentinya memeras keringat, mendoakan, memberikan motivasi, semangat, nasihat, serta kasih sayang sedemikian tulus demi anaknya, dan juga kepada semua saudara-saudaraku sekaligus inspirasi dalam hidup saya terima kasih karena telah memberikan perhatian, kasih sayang serta selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly,S.E,M,Si dan ibu Darma Yanti ,S.E.,AK.,M.M.,CA selaku dosen pembimbingku yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan juga saran-saran dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan sripsi ini, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H Abid Djazuli, SE,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staf dan Karyawan/Karyawati.
2. Bapak Drs.H Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff Karyawan/Karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.M.si.,Ak.,CA dan ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua dan wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku pembimbing Akademik.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Kepada Camat dan Seketaris Desa beserta staff di Kantor Camat Penukal Utara dan Kepala Desa berserta perngkat desa di desa Tanjung Baru,Sukarami.Kota Baru
7. Kepada semua saudara-saudaraku sekaligus inspirasi dalam hidup saya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun demi lebih menyempurnakan selanjutnya.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.Amin.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2020

Penulis

Era Sumantri

Abstrak

Era Sumantri / 222015089 / 202 / Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Penukal Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Penukal Utara. Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelola keuangan secara akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Tanjung Baru, Sukarami, Kota Baru di kecamatan Penukal Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 98 orang kecamatan Penukal Utara. Data sekunder yang diperoleh dengan mengunakan metode tinjauan pustaka, mengakses website, dan situs-situs, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas di Desa Tanjung Baru, Sukarami, Kota Baru di Kecamatan Penukal Utara telah melaksanakan kewajiban dan bertanggungjawab dalam mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*

Abstract

Era Sumantri / 222015089/2020 / The analysis of Village Government Accountability in Managing Village Income and Budgeting calculation in Kecamatan Penukal Utara

The formulation of the problem in this research was how the accountability of the village government in managing village income and expenditure budgets in kecamatan Penukal Utara. The purpose of this research was to determine the accountability of village government in managing village income and expenditure budgets in kecamatan Penukal Utara. This research used descriptive that aimed to provide an overview of financial managers in the accountability of the village government in managing the village budget and income. The population in this research were all residents of Tanjung Baru Village, Sukarami, Kota Baru in kecamatan Penukal Utara. The samples in this research were 98 people in kecamatan penukal utara. Secondary data obtained by using the literature review method, accessing websites, and sites, while the data collection methods used in this research were interview techniques, questionnaires, observations and documentation. The data analysis technique used was descriptive. The results of this research indicated that accountability in Tanjung Baru Village, Sukarami, Kota Baru in kecamatan Penukal Utara had implemented the obligations and had responsiblity in managing, presenting, reporting and conveying all activities implemented to the society.

Keywords: *Accountability, Village Government, Village Budget and Revenue*

PENGESAHAN
NO. 145 /Abstrak/ [illegible] UMP/ II / 20 20
Telah di K[illegible]
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER..... i

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

HALAM PERSEMBAHAN DAN MOTTO……v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI ix

HALAMAN DAFTAR TABEL..... xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xiv

HALAMAN ABSTRAK..... xvi

HALAMAN *ABSTRACT*..... xvi

BAB.I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12
.....

1. Bagi Penulis ……12

2. Bagi Pemerintahan Desa 13

3 Bagi Almamater……13

BAB. II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 14

1. Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa (APBdesa..... 14

a. Indikator Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBdes) 15

b. Peran Masyrakat Dalam Penyusunan APBdesa 16

c. Paradgima Pengelolaan Keuangan APBdes 17

2. Akuntanbilitas 24

a.Indikator Akuntanbilitas 27

b.Persyaratan Akuntanbilitas 28

c.Pembagian Akuntanbilitas 29

B.Penelitian sebelumnya. 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian 31

C. Populasi dan Sampel 32

D. Operasional Variabel

1.Populasi. 32

2.Sampel. 33

E. Data yang Diperlukan 34

1.Sumber Data Primer ……34

2. Data Sekunder..... 34

F. Metode Pengumpulan Data 34

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 35

1Analisis Data. 35

2.Teknik Analisis. 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 37

B. Pembahasan Hasil Penelitian. 52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti : 2012).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan

publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung.

Pelaksanaan pemerintah Desa pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat desa dengan memberikan kebebasan yang lebih besar untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, Desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber

daya dan keuangan Desanya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa administratif di Indonesia paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Diterimanya dana bagi Desa tersebut pemerintahan Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Keuangan Desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menegah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa

APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat Desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Dan *keempat* masih banyak program pembangunan masuk Desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hudayana, 2015: 45).

Melaksanakan tata kelola yang baik maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tertuang pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sitem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan

bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.

Dalam pengajuan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke bupati atau wali kota melalui camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Sabeni dan Gozali (dalam Sujarweni: 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulgan (2013: 3) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI tahun 2008 akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Riskasari (2016) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bongki Lengkese berdasarkan indikator akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*) oleh Riskasari sudah memadai dengan pemahaman para perangkat desa mengenai tugas dan fungsinya. Dengan demikian strategi

pengembangan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan Sumber Daya perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada.

Laporan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI Sebagai berikut:

Tabel I.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa
Di Kecamatan Penukal Utara Tahun 2018

Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Tanjung Baru	**Alokasi Dana Desa**	**1.559.108.375**	**1.325.457.860**	
	Dialokasikan Sesuai dengan Permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	467.732.512	397.637.358	85,03
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	1.091.375.863	927.820.502	85,03
Sukarami	**Alokasi Dana Desa**	**1.408.946.406**	**1. 366.781.054**	
	Dialokasikan sesuai dengan permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	422.683.922	410.034.316	97,01
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	986.262.484	956.746.738	97,01
Kota Baru	**Alokasi Dana Desa**	**1.978.100.725**	**1.907.715.433**	
	Dialokasikan sesuai dengan permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	593.430.217	572.314.630	96,44
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	1.384.670.508	1.335.400.803	96,44

Sumber: Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami, Desa Kota Baru 2020

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat persentase dana yang direalisasikan untuk pembangunan Desa pada Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami, Desa Kota Baru sudah sesuai anggaran yang diberikan. Untuk belanja aparatur dan operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Tabel I.2
Program Kegiatan Desa
Di Kecamatan Penukal Utara Tahun 2018

Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi
Tanjung Baru	a) Keg. Pengembangan Desa	244.000.000 406.897.363	244.000.000 312.835.502
	b) Keg. Pengeresan Jalan-Jalan Desa	20.000.000	15.000.000
	c) Keg. Pemasangan Lampu Jalan	7.000.000	7.000.000
	d) Keg. Fasilitas Bina Ketertiban umum	4.000.000	4.000.000
	e) Keg. Fasilitas Pembinaan Pemuda dan Olahraga	23.643.000 19.357.000	23.643.000 19.357.000
	f) Keg. Fasilitas Pembinaan Operasional Perempuan	7.000.000 10.000.000	7.000.000 10.000.000
	g) Keg. Fasilitas Pembinaan Kesenian dan Budaya	105.000.000	79.000.000
	h) Keg. Kapasitas Aparatur Pemerintah	55.000.000 180.000.000	36.000.000 180.000.000
	i) Keg. Kapasitas Lembaga Kemasyarakata	35.000.000	35.000.000
	j) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Pendidikan		

	k) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Kesehatan l) Keg. Fasilitas Pengembangan BUMDes m) Keg. Fasilitas Jalin Matra/Kepel		
Sukarami	a) Keg. Pengembangan Desa b) Keg. Pengerasan Jalan Usaha Tani c) Keg. Fasilitas Bina Ketertiban umum d) Keg. Fasilitas Pembinaan Pemuda dan Olahraga e) Keg. Fasilitas Pembinaan Operasional Perempuan f) Keg. Fasilitas Pembinaan Kesenian dan Budaya g) Keg. Kapasitas Aparatur Pemerintah h) Keg. Kapasitas Lembaga Masyarakat i) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Pendidikan j) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Kesehatan k) Keg. Fasilitas Pengembangan BUMDes l) Keg. Fasilitas Jalin Matra/Kepel	257.000.000 312.387.484 6.000.000 3.000.000 21.143.000 18.857.000 7.500.000 9.000.000 93.000.000 54.000.000 190.000.000 30.000.000	257.000.000 289.252.738 6.000.000 3.000.000 21.143.000 18.857.000 7.500.000 9.000.000 93.000.000 47.000.000 190.000.000 30.000.000

Kota Baru	a) Keg. Pengembangan Desa b) Keg. Pembuatan Saluran Drainase c) Keg. Pembangunan Instalasi Air Bersih d) Keg. Fasilitas Bina Ketertiban umum e) Keg. Fasilitas Pembinaan Pemuda dan Olahraga f) Keg. Fasilitas Pembinaan Operasional Perempuan g) Keg. Fasilitas Pembinaan Kesenian dan Budaya h) Keg. Kapasitas Aparatur Pemerintah i) Keg. Kapasitas Lembaga Kemasyara j) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Pendidikan k) Keg. Fasilitas/Akses Layanan Dasar Kesehatan l) Keg. Fasilitas Pengembangan BUMDes m) Keg. Fasilitas Jalin Matra/Kepel	289.869.000 251.107.200 230.040.500 7.000.000 4.000.000 22.671.300 19.357.000 7.700.000 11.000.000 104.760.000 66.800.000 315.000.000 39.000.000	289.869.000 224.057.308 200.050.200 7.000.000 4.000.000 22.671.300 19.357.000 7.700.000 11.000.000 104.760.000 66.800.000 315.000.000 39.000.000

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel I.2 program kegiatan desa di Kecamatan Penukal Utara seperti Sedekah bumi adalah upacara adat yang dilakukan di balai desa, dimana seluruh warga berkumpul untuk makan lemang bersama dan kegiatan lainnya sebagai bukti rasa syukur warga kampung terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi. Turnamen untuk anak remaja dalam rangka merayakan 17 Agustusan seperti Bola Volly, Sepak Bola, Bulu Tangkis. Operasional BPD seperti gaji pengurus dan kegiatannya, Anggaran

kegiatan pembinaan kader PKK seperti belajar masak, belajar menjahit, belajar tanaman apotik hidup dan sebagainya. Kegiatan Posyandu seperti imunisasi, penyuluhan KB dan sebagainya. Senam untuk ibu-ibu biasa dilakukan setiap hari minggu. Kebersihan desa dilakukan setiap hari minggu dalam rangka menjaga kebersihan desa dan keakraban sesama warganya.

Fenomena yang menarik dalam penelitian ini dimana persentase dana yang direalisasikan untuk pembangunan Desa pada Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami, Desa Kota Baru sudah sesuai anggaran yang diberikan. Untuk belanja aparatur dan operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya dalam akuntabilitas program pemerintah desa belum dilakukan dengan secara benar, laporan berbeda dengan kenyataan di lapangan terutama pada Tahun 2018. Dimana dalam laporan keuangannya desa-desa di kecamatan Penukal Utara masih banyak program-program yang belum terrealisasi. Adapun program yang belum terrealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel I.3
Rekapitulasi Program yang Belum Terrealisasi
di Kecamatan Penukal Utara Tahun 2018

Desa	Program	Anggaran	Realisasi	%
Tanjung Baru	Pemasangan lampu jalan	20.000.000	15.000.000	75,00
Tanjung Baru	Pengeresan jalan-jalan desa	406.897.363	312.835.502	76,88
Sukarami	Pengerasan jalan usaha tani	312.387.484	289.252.738	92,59
Kota Baru	Pembuatan saluran drainase	251.107.200	224.057.308	89,22
Kota Baru	Pembangunan instalasi air bersih	230.040.500	200.050.200	86,96

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel I.3 program yang belum terrealisasi disebabkan pemerintah desa tidak terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang belum diterapkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan Desa, belum semua Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal.

Desa-Desa di Kecamatan Penukal Utara pada umumnya belum benar dalam pengelolaan APBDes dimana tidak terrealisasi secara akuntabilitas, karena masyarakat Desa tidak tahu berapa besar dana yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi pemerintahan Desa, pemerintahan Desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dalam pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti teliti, Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti agar laporan keuangan pemerintahan Desa di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas

laporan APBDes pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas laporan APBDes pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Kecamatan Penukal Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai pengetahuan dan bukti empiris yang ada mengenai penerapan akuntabilitas APBDes pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan Permendagri No.113.

2. Bagi Pemerintah Desa

   Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan pengguna utama laporan keuangan agar lebih menyadari pentingnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi

penulis di masa yang akan datang yang berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran dan belanja Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekaran Prakrek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

BPS (Badan Pusat Statistik). 2018. *Kecamatan Penukal Utara dalam Angka*. BPS Kabupaten Muara Enim.

Dwi Febri Arifiyanto, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan Volume 2 Nomor 3.

Halim dan Herawaty. 2016. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online. 2019. Arti Kata *akuntabilitas*

Lembaga Administrasi Negara. 2003. Tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Andi

Masiyah Kholmi. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 07 No. 02

Mulgan, R. 2013. *Accountability : An Ever – Expanding Concept.* Journal Public Administration, Vol.78 (No. 3), 555–576.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 pasal 68 ayat 1 tentang *Desa*

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 Tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Riskasari. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal Office, Vol. 2 No 2 Universitas Muhammadiyah Makassar

Siti Ainul Wida. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kuantatif dan R&D) (Edisi Revisi*). Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Desa*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa mengamanatkan kepada pemerintah*

Undang-Undang No.28 tahun 1999 Pasal 7 Tentang *Asas Akuntabilitas*

Vilmia Farida. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*. Jurnal Akademik Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang